

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2007 SKPD di setiap kabupaten mulai berupaya mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Reformasi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian terintegrasi dengan pengelolaan keuangan negara merupakan hal yang harus diterima dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi (Lyna Latifah dan Arifin Sabeni, 2007).

Pemerintah daerah Kabupaten Jember bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengimplementasikan penggunaan sistem informasi akuntansi terintegrasi. Perubahan menjadi sistem online membuat sistem pelaporan dan manajemen keuangan pemerintah Kabupaten Jember bisa menjadi lebih cepat, sehingga ketika pimpinan ingin melihat laporan dapat langsung diakses dan memberikan informasi yang akurat. Namun dalam mengoperasikan sistem akuntansi keuangan daerah masih banyak pegawai pemerintah yang belum memahami cara mengoperasikan sistem tersebut, maka dari itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset perlu melakukan bimbingan teknis dimana para pegawai diberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem tersebut. Kehadiran sistem teknologi informasi telah banyak mengubah organisasi. Saat ini organisasi mulai bergantung pada sistem teknologi informasi, suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi, walaupun pimpinan yang mengambil keputusan untuk mengadopsi suatu sistem teknologi informasi, tetapi keberhasilan penggunaan teknologi tersebut tergantung dari penerima dan penggunaan oleh individu-individu. Dengan demikian, manfaat dan dampak

langsung dari sistem teknologi informasi ini adalah terhadap individual pemakai dan yang kemudian akan meningkatkan produktivitas organisasi. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dari pusat maupun daerah. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja.

Perilaku organisasi adalah suatu studi yang mempelajari tingkah laku manusia dimulai dari tingkah laku secara individu, kelompok dan tingkah laku ketika berorganisasi serta pengaruh perilaku individu terhadap kegiatan organisasi dimana mereka melakukan atau bergabung dalam organisasi tersebut. Perilaku organisasi juga merupakan suatu bidang studi yang mengamati tentang pengaruh perilaku individu, kelompok dan perilaku dalam struktur organisasi dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki keefektifan organisasi.

Aspek keperilakuan pada bidang akuntansi, baik dari pihak pelaksana dan penyusun laporan keuangan adalah seseorang atau kumpulan yang mengoperasikan sistem informasi akuntansi dari awal hingga akhir terwujudnya laporan keuangan. Sehingga pihak pelaksana dan penyusunan memainkan peranan yang penting dalam menompong kegiatan atau operasi harian organisasi (Dwi Cahyono, 2012).

Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem, pelatihan mempersiapkan pegawai untuk mengambil tindakan tertentu yang digambarkan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja serta membantu dalam memperbaiki performansi pegawai pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya.

Dukungan atasan dalam melakukan pelatihan terhadap implementasi suatu sistem dapat diartikan juga sebagai bantuan yang diberikan oleh pimpinan yang lebih tinggi kepada bawahan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai,

dukungan atasan juga dapat diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan.

Pelatihan dan dukungan atasan membantu individu-individu dalam penerimaan dan penggunaan sistem teknologi informasi. Dengan demikian, manfaat dan dampak langsung dari sistem teknologi informasi ini adalah terhadap individual pemakai dan yang kemudian akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Penelitian yang dilakukan Sabeni dan Latifah (2007), tentang Faktor-faktor Keperilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan hasil bahwa dari faktor organisasi yang diuji, hanya dukungan atasan yang berpengaruh untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berhasil dibuktikan.

Penelitian yang dilakukan Heri Hidayat (2008) tentang Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD), hasil menunjukkan bahwa sebanyak 38 temuan yang mengindikasikan perbedaan antara aturan (format standart) yang berlaku yaitu PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, dikarenakan belum menggunakan Struktur organisasi baru yang sesuai PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2006 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Penelitian yang dilakukan Azhar (2008), tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi, komitmen, SDM bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Permendagri No. 13 Tahun 2006, sedangkan regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan Kurnia Sari Nur dan Pangesti (2008) tentang Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD, studi kasus penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 di pemerintah daerah Kabupaten Batang, variabel kesesuaian struktur organisasi berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan.

Sedangkan variabel bukti transaksi dan klasifikasi rekening tidak mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Setelah membaca uraian diatas, penelitian ini akan menguji hubungan faktor perilaku terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007, Atas Perubahan Permendagri No.13 Tahun 2006, dimana sistem tersebut mulai diimplementasikan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini akan menguji hubungan faktor perilaku organisasional dalam meningkatkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Perlu adanya pembenahan SDM dibidang pelatihan dan dukungan atasan didalam organisasi untuk penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut “FAKTOR KEPRILAKUAN ORGANISASI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN JEMBER”. Faktor lingkungan organisasi dapat mempengaruhi jalannya implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang baru diimplementasikan dan pada akhirnya akan mempengaruhi kesuksesan implementasi tersebut. Faktor lingkungan organisasi yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi pelatihan dan dukungan atasan yang juga berpengaruh dalam implementasi sistem yang berkaitan dengan masalah individu personal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rendahnya perilaku organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

## **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Bagaimana cara meningkatkan perilaku organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah ?

## **1.4 Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah faktor perilaku organisasi pelatihan mempunyai pengaruh dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ?

2. Apakah faktor perilaku organisasi dukungan atasan mempunyai pengaruh dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?
3. Apakah faktor perilaku organisasi pelatihan dan dukungan atasan mempunyai pengaruh dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan langsung faktor perilaku organisasi pelatihan dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui hubungan langsung faktor perilaku organisasi dukungan atasan dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui hubungan langsung faktor perilaku organisasi pelatihan dan dukungan atasan dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Universitas. Hasil penelitian ini sebagai pembelajaran dan dapat menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi instansi terutama tentang akuntansi keperilakuan dan dapat menjadi bahan masukan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang saat itu ditetapkan.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi fakultas dalam mempertimbangkan pentingnya muatan mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dan Akuntansi Sektor Publik dalam Program Studi Akuntansi.